

SISTEM PENDIDIKAN (Studi Komparasi antara Indonesia dan Jepang)

Achmadi dan Mahasri Shobahiya***

**Mahasiswa Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surakarta*

*** Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta*

Jl. A. Yani Pabelan Tromol Pos I Kartasura, Surakarta 57102

E-mail: mahasrishobahiya@yahoo.co.id

Abstrak

Ada beberapa jalur untuk mengenal budaya dari suku, bangsa atau negara lain. Pertama, melalui sarana perniagaan atau kehidupan ekonomi. Kedua, melalui penaklukan atau peperangan. Ketiga, adanya kontak antar negara melalui kerja sama bilateral yang bersifat mutual-cooperation, baik dalam bentuk pertukaran para ahli maupun pengembangan di bidang pengetahuan. Kontak antar negara dalam bentuk kerja sama pengembangan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung akan sangat bermanfaat untuk memperluas cakrawala terhadap pendidikan nasional dan diharapkan dapat mengambil nilai-nilai positif dari negara tertentu untuk menunjang usaha peningkatan kualitas pendidikan nasional. Berdasarkan hal itu, dalam tulisan ini memaparkan sebagian kecil sistem pendidikan negara Jepang, baik pendidikan secara umum maupun pendidikan agama, untuk kemudian dikaji persamaan dan perbedaannya dengan sistem yang dikembangkan di Indonesia.

Kata kunci: *Perbandingan pendidikan, Sistem pendidikan, Jepang, Indonesia.*

Pendahuluan

Bagaimana suatu bangsa dapat mengenal bangsa lain? Ada beberapa cara yang menyebabkan suatu suku, bangsa, atau negara dapat mengenal budaya di luar suku, bangsa, atau negaranya sendiri. *Pertama*, melalui sarana perniagaan atau kehidupan ekonomi. Kontak perdagangan ini merupakan

kondisi tak terelakkan dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang kian berkembang, saling memerlukan barang dan jual-beli benda. Kontak ini merupakan awal terjadinya interaksi antar bangsa, terlebih setelah pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan sarana alat transportasi. Seluruh pelosok daerah menjadi mudah dijangkau dan

pertukaran barangpun menjadi lancar sehingga para pelaku pasar saling mengamati kebutuhan penduduk setempat. Adat istiadat lokal, termasuk praktek pendidikan yang dilaksanakan di negara atau bangsa yang dikunjungi dapat dikenal tanpa sengaja. Dari situ kemudian terjadilah kontak dengan budaya lain di luar bangsanya. Pengamatan ini dalam jangka panjang dapat menjadi faktor kuat terjadinya pembaharuan pendidikan suatu bangsa.

Kedua, melalui penaklukan atau peperangan. Umumnya bangsa pemenang akan tampil sebagai penguasa, kadangkala diikuti dengan perubahan mendasar dalam hal sistem kebijakan pendidikan yang berlaku sebelumnya di negara yang ditaklukkan, meskipun kadang-kadang sistem dan kebijakan pendidikan sebelumnya ada yang tetap dipertahankan. Ketika terjadi imperialisme bangsa Barat terhadap negara berkembang, upaya pengenalan pendidikan kolonial dilakukan dengan tujuan asosiasi budaya, seperti yang pernah diterapkan oleh Belanda terhadap Indonesia, Perancis terhadap Mesir, atau Inggris terhadap India, Malaysia, dan lainnya.

Ketiga, adanya kontak antar negara melalui kerja sama bilateral yang bersifat *mutual-cooperation*, baik dalam bentuk pertukaran para ahli maupun pengembangan di bidang pengetahuan. Termasuk jalur ini adalah pertukaran diplomatik, budaya, pelajar, mahasiswa, guru, dosen, atau kerja sama luar negeri di bidang pendidikan (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 24-25).

Kontak antar negara dalam bentuk kerja sama pengembangan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung akan sangat bermanfaat untuk memperluas cakrawala terhadap pendidikan nasional dan diharapkan dapat mengambil nilai-nilai positif dari negara tertentu untuk menunjang usaha peningkatan kualitas pendidikan nasional.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis tertarik untuk mengkaji sistem pendidikan yang dikembangkan di Jepang dengan membandingkannya dengan sistem pendidikan yang dikembangkan di Indonesia. Perbandingan ini untuk melihat persamaan dan perbedaan sistem pendidikan yang dikembangkan di kedua negara tersebut.

Sistem Pendidikan Jepang

Peraturan pendidikan di Jepang dapat dibedakan dalam dua periode, yaitu sebelum dan sesudah perang Dunia II. Sebelum perang, kebijakan pendidikan yang berlaku adalah Salinan Naskah Kekaisaran tentang Pendidikan (*Imperial Rescript on Education*). Dinyatakan bahwa para leluhur kaisar terdahulu telah membangun kekaisaran dengan berbasis pada nilai yang luas dan kekal, serta menanamkannya secara mendalam dan kokoh. Materi pelajarannya dipadukan dalam bentuk kesetiaan dan kepatuhan dari generasi ke generasi yang menggambarkan keindahannya. Itulah kejayaan dari karakter kaisar, dan ia juga telah mengendalikannya dengan sumber-sumber berpendidikan. Pendidikan hendaknya mampu mengafiliasikan seseorang

kepada orang tuanya, suami isteri secara harmoni, sebagai sahabat sejati, menjadi diri sendiri yang sederhana dan moderat, mencurahkan kasih sayang kepada semua pihak, serta menuntut ilmu dan memupuk seni. Dari situlah pendidikan tersebut dapat mengembangkan daya intelektual dan kekuatan moralnya yang sempurna, selalu menghormati konstitusi, dan menjalankan hukum. Dalam kondisi darurat sekalipun, diharapkan dapat mempersembahkan keberanian demi negara, melindungi dan menjaga kesejahteraan istana kaisar seusia langit dan bumi. Maka, tidaklah menjadi orang yang baik dan setia semata, melainkan mampu melanjutkan tradisi leluhur yang amat mulia.

Sesudah perang, mulai 3 November 1946, konstitusi baru Jepang menetapkan kebijakan pendidikannya atas dasar hak asasi manusia, jaminan kebebasan berpikir, dan hati nurani, kebebasan beragama, kebebasan akademik, dan hak bagi semua orang untuk mendapatkan pendidikan sesuai dengan kemampuan mereka. Pada Maret 1947, melalui Peraturan Pendidikan Nasional (*School Education Law*) ditetapkan susunan dasar pendidikan keseluruhan atas dasar 6-3-3-4 beserta tujuan khusus pada tiap jenjangnya (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 187-189).

Pada Maret 1947 juga berlaku Hukum Dasar Pendidikan (*Fundamental Law of Education*) yang pada hakekatnya merupakan statement filsafat pendidikan demokratis yang dalam banyak hal berbeda dengan *Imperial Rescript*

on Education. Misalnya, dalam hubungan antara warga dengan negara, dalam *Imperial Rescript on Education* disebutkan bahwa, *Citizens have the duty to develop their intellectual and moral faculties, observe the laws, and offer themselves courageously to the state in order the guard and maintain the prosperity of imperial throne* (Imam Barnadib, 1986: 53), (setiap warga memiliki kewajiban untuk mengembangkan daya intelektual dan moral mereka, melaksanakan hukum dan mempersembahkan keberaniannya demi negara untuk melindungi dan menjaga kesejahteraan istana kaisar). Sedangkan dalam *Fundamental Law of Education* disebutkan bahwa, *Citizen have the right to equal opportunity or receiving education according to their ability; freedom from discrimination on account of race, cree sex, social status, economic position, or family origin; financial assistance, to the able needy, academic freedom, and the responsibility to build a peaceful state and society* (Imam Banrnadib, 1986: 53), (Setiap warga memiliki kesempatan yang sama menerima pendidikan menurut kemampuan mereka, bebas dari diskriminasi atas dasar ras, jenis kelamin, status sosial, posisi ekonomi, asal usul keluarga, bantuan finansial, bagi yang memerlukan, kebebasan akademik, dan tanggung jawab untuk membangun negara dan masyarakat yang damai). Perbedaan yang lain adalah mengenai tujuan pendidikan. Dalam *Imperial Rescript on Education* disebutkan

bahwa tujuan pendidikan adalah untuk meningkatkan kesetiaan dan ketaatan bagi Kaisar agar dapat memperoleh persatuan masyarakat di bawah ayah yang sama, yakni Kaisar. Adapun tujuan pendidikan menurut *Fundamental Law of Education* adalah untuk meningkatkan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individu, dan menanamkan jiwa yang bebas.

Sistem pendidikan di Jepang dibangun atas empat tingkat, yaitu: pusat, *perpektual* (antara Provinsi dan Kabupaten), *municipal* (antara Kabupaten dan Kecamatan), dan sekolah. Sistem administrasi tersebut menerapkan kombinasi antara sentralisasi, desentralisasi, Manajemen Berbasis Sekolah (*School Based Management*), dan partisipasi masyarakat. Di samping itu, terdapat asosiasi-asosiasi kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua yang mendukung pengembangan sekolah. Dalam sistem tersebut terdapat peran dan hubungan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, asosiasi-asosiasi tersebut, dan masyarakat yang saling mengisi se-hingga tercipta sinergi yang memungkinkan sistem tersebut menjadi relatif efisien dan efektif. Hal ini merupakan faktor utama pencapaian mutu pendidikan di Jepang yang relatif tinggi (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 175).

Adapun sistem pendidikan umum di Jepang ditetapkan lebih dari satu abad yang lalu dan keberadaannya berlangsung lebih lama dari pada kebanyakan negara. Sistem pendidikan Jepang pada dasarnya adalah Sekolah Dasar (SD) 6 (enam)

tahun, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 3 (tiga) tahun, Sekolah Menengah Atas (SMA) 3 (tiga) tahun, Universitas 4 (empat) tahun, dan Lembaga Pendidikan Tinggi 2 (dua) tahun. Wajib belajar adalah dari SD sampai SMP. Untuk masuk SMA dan Universitas pada dasarnya harus mengikuti ujian masuk. Selain sekolah tersebut, ada sekolah kejuruan atau sekolah khusus yang menampung lulusan SD atau SMP. Sekolah ini mengajarkan keterampilan khusus (<http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-01.html>). Di samping beberapa jenjang pendidikan tersebut, di Jepang juga terdapat program pendidikan prasekolah, baik dalam bentuk Taman Kanak-Kanak (TK) maupun Play Group (PG).

Jika dilihat dari pengelola sekolah, dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu Sekolah Negeri adalah sekolah yang dikelola pemerintah, Sekolah provinsi adalah sekolah yang dikelola pemerintah daerah, Sekolah Swasta adalah sekolah yang dikelola badan hukum. Sedangkan apabila dilihat dari tahun ajarannya, sekolah dimulai bulan April dan berakhir pada bulan Maret tahun berikutnya (<http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-01.html>).

Pendidikan Prasekolah

Pendidikan pra-sekolah dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu Kelompok Bermain (KB) atau Play Group (PG) dan Taman Kanak-Kanak (TK).

Play Group (PG) adalah merupakan fasilitas yang disediakan bagi para orang

tua yang bekerja sehingga tidak dapat mengasuh anaknya di siang hari. Pendaftaran murid baru dimulai setiap awal Januari. Permohonan untuk masuk ke PG ini dilakukan di kantor pemerintahan setempat karena terbatasnya jumlah tempat untuk masuk ke kelompok bermain ini. Biaya pengasuhan disesuaikan dengan pendapatan per kapita orang tua pada tahun sebelumnya yang diatur pemerintah wilayah kota setempat (<http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id11-04.html>). Lembaga ini disebut *Hoiku-jo* (Pusat Perawatan Siang Hari), dan termasuk lembaga kesejahteraan sosial, di samping juga berfungsi sebagai tempat pendidikan prasekolah. Peserta yang masuk *Hoiku-jo* adalah bayi hingga anak usia 5 tahun. Mereka yang berusia 3 tahun ke atas biasanya mendapat pendidikan seperti TK. Kebanyakan pusat penitipan anak seperti ini dikelola oleh pemerintah daerah.

Abd. Rahman Assegaf (2003: 176-177) memaparkan bahwa TK di Jepang menerima murid berusia 3 sampai 5 tahun untuk lama pendidikan 1 sampai 3 tahun. Anak berusia 3 tahun diterima dan mengikuti pendidikan selama 3 tahun, sedangkan anak berusia 4 tahun mengikuti pendidikan selama 2 tahun dan bagi pendaftar berusia 5 tahun hanya menempuh pendidikan prasekolah selama 1 tahun. Lebih dari 50% TK di Jepang dikelola oleh swasta, sisanya oleh pemerintah kota dan hanya sebagian kecil yang merupakan TK Negeri. Meski demikian, semua TK adalah pendidikan prasekolah di bawah naungan Departemen Ilmu

Pengetahuan Pendidikan dan Kebudayaan yang dikelola berdasarkan hukum pendidikan (<http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-02.html>).

TK atau yang disebut *youchien* bertujuan untuk mengasuh anak-anak usia dini dan memberikan lingkungan yang layak bagi perkembangan jiwa anak. Untuk mencapai tujuan tersebut, ada beberapa cara yang dilakukan, antara lain: (1) Merancang pendidikan yang mengembangkan fungsi tubuh dan jiwa secara harmoni melalui pembiasaan pola hidup yang sehat, aman, dan menyenangkan; (2) Menumbuhkan semangat kemandirian, kehidupan berkelompok yang penuh kegembiraan dan kerjasama; (3) Mengenalkan kehidupan sosial dan membina kemampuan bersosialisasi; (4) Mengarahkan penggunaan bahasa dengan benar serta menumbuhkan minat berkomunikasi dengan sesama; (5) Mengarahkan minat untuk berkreasi melalui pembelajaran musik, permainan, menggambar dan lain-lain.

Berpijak pada tujuan tersebut, TK menginterpretasikan dalam silabus pembelajaran yang dimungkinkan sama di setiap sekolah. Contoh: jam belajar sehari di TK di Sono Youchien, Iwakura, Aichi Prefecture sebagai berikut:

Nama Kelas	Momiji 2	Umur:...th	TTD Kepsek	TTD Guru
Senin, 12-6-2006		Cuaca	Nama Guru	
Pesan Mingguan	1. Udara cerah, bermain di luar. Jika hujan, kegiatan dilakukan di dalam kelas 2. Latihan gerak dengan musik yang menyenangkan. 3. Menumbuhkan minat kepada Tsuyu. (musim hujan, di bulan Juni, sebagian wilayah Jepang hujan)			
Pesan Harian	1. Guru memberi contoh yang baik. 2. Anak yang enggan bermain disemangati.			
Tujuan Exercise Hari ini				
Jam	Kegiatan	Lingkungan dan Kondisi Murid	Pesan/Tindakan Guru	
8.50	Masuk kelas	Taroh barang di loker, kemudian duduk di bangku	Ucapan (selamat pagi) dengan wajah gembira. Periksa keadaan murid satu per satu sambil menanyakan kabar masing-masing anak	
9.05	Pengenalan exercise hari ini Absen	Ucapan selamat di pagi hari, lagu dan absensi. Kartu absen diisi	Sambil mengabsen, menanyakan perubahan kondisi anak	
9.15	Break ke toilet	Latihan cara buang air sendiri, cebok, dan mencuci tangan dengan sabun	Memeriksa apakah tata caranya sudah benar, membenarkan yang salah	
9.20	Menyanyi	Ada anak yang menyanyi dengan semangat, ada juga yang loyo	Sambil memperhatikan keadaan anak satu per satu, mainkan piano sesuai dengan kemampuan anak, juga ajarkan anak untuk menyesuaikan dengan suara temannya (intinya bikin paduan suara yang bagus)	
9.45	Senam pagi	Senam di halaman sekolah		
10.00	Masuk kelas Copot kaus kaki	Kaus kaki dicopot, disatukan dan dimasukkan dalam loker	Perhatikan apakah siswa mencopot kaus kaki dengan benar dan melipatnya/menggulungnya dengan benar. berikan bantuan jika anak belum bisa melakukannya dengan baik.	
10.20	Ritmik	Ada anak yang semangat, ada anak yang lemes	Dengarkan ucapan Fujikawa sensei (guru ritmik yang memainkan piano didatangkan khusus), dengarkan dengan baik nada yang muncul dan bimbing anak untuk mengikutinya	
10.45	Bermain	Pakai topi merah, bermain di luar kelas/di kebun/halaman sekolah	Ikuti dan amati anak-anak yang bermain kalau bisa arahkan, bantu mereka dalam bermain.	

11.45	Alat bermain dirapikan, masuk kelas, bersiap makan	Cuci tangan dan ugai (memasukkan air ke tenggorokan tapi tidak ditelan, untuk mencegah batuk/pilek) sebelum masuk kelas, yang mau ke toilet dipersilahkan. Masuk ke kelas dan mengeluarkan bento (bekal) masing-masing.	Periksa perlengkapan makan anak
12.00	Makan siang	Cara duduk untuk makan yang benar. Apakah perlengkapan makan anak lengkap, jika ada yang lupa bawa sendok atau sumpit, siapkan	Perhatikan cara makan, ajari cara menggunakan sumpit, sendok atau garpu. Usahakan acara makan pun menyenangkan
12.40	Gosok gigi	Gosok gigi di luar kelas, di seputar kran air (letaknya di lantai 1 dengan bentuk melingkar)	Perhatikan dan ajari cara menggosok gigi yang benar.
13.00	Game	Bermain permainan tradisional atau modern. Ada anak yang berminat, ada yang tidak.	Perhatikan kemampuan anak dalam bekerjasama, tumbuhkan rasa percaya diri anak yang malu-malu.
13.30	Bermain di luar		
14.00	Berkumpul, bersiap untuk pulang	Cuci tangan, ugai, pipis. Bersiap untuk pulang	Ucapan (besok pun harus bersemangat ke sekolah) dengan gembira dan bersemangat
14.25	Menyanyi lagu salam perpisahan	Menyanyi dengan gembira, tenang dalam berbaris. Baris per kelas di depan sekolah	Antarkan kepulangan mereka dengan senyum, gembira dan ucapan-ucapan yang menyemangati
15.00	Pulang		

(<http://murniramli.wordpress.com/2007/03/06taman-kanak-kanak-di-jepang/>)

Pendidikan Wajib

Wajib sekolah berlaku bagi anak usia 6 sampai 15 tahun, tetapi kebanyakan anak bersekolah lebih lama dari yang diwajibkan. Tiap anak bersekolah di SD pada usia 6 tahun hingga 12 tahun, lalu SMP hingga usia 15 tahun. Pendidikan wajib ini bersifat *cuma-cuma* bagi semua anak, khususnya biaya sekolah dan buku. Untuk alat-alat pelajaran, kegiatan di luar sekolah, piknik dan makan siang di sekolah perlu membayar sendiri. Namun bagi anak-anak dari keluarga yang tidak mampu mendapat bantuan khusus dari pemerintah pusat dan daerah. Di samping itu ada juga bantuan untuk kebutuhan belajar, perawatan kesehatan, dan lain-lain. Seorang anak yang telah tamat SD diwajibkan meneruskan pendidikannya ke jenjang SMP. Dengan demikian, sekolah wajib ditempuh selama 9 tahun; 6 tahun di SD dan 3 tahun di SMP (<http://www.clair.or.id/jp/tagengo/general/id/id09-03.html>).

Hampir semua siswa di Jepang belajar bahasa Inggris sejak tahun pertama SMP, dan kebanyakan mempelajari bahasa Inggris selama 6 tahun. Mata pelajaran wajib di SMP adalah bahasa Jepang, ilmu-ilmu sosial, matematika, sains, musik, seni rupa, pendidikan jasmani, dan pendidikan kesejahteraan keluarga. Berbagai mata pelajaran tersebut diberikan pada waktu yang berlainan setiap hari selama seminggu sehingga jarang ada jadwal pelajaran yang sama pada hari yang berbeda (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 177-178).

Pendidikan Menengah Atas

Ada tiga jenis SMA, yaitu: *full time*, *part time* (terutama malam hari), dan tertulis. Sekolah menengah yang *full time* berlangsung selama 3 tahun, sedangkan kedua jenis sekolah lainnya menghasilkan diploma yang setara. Bagian terbesar siswa mendapat pendidikan menengah atas di SMA *full time*. Jurusan di SMA dapat dikategorikan ke dalam beberapa jenis berdasarkan pola kurikulum, yaitu jurusan umum (akademis), pertanian, teknik, perdagangan, perikanan, *home economic*, dan perawatan. Untuk masuk ke salah satu jenis sekolah tersebut, siswa harus mengikuti ujian masuk dan membawa surat referensi dari SMP tempat ia lulus sebelumnya.

Hampir semua SMP dan SMA serta Universitas swasta menentukan penerimaan siswa melalui ujian masuk, dan setiap sekolah menyelenggarakan ujian masuk sendiri. Siswa yang ingin masuk sekolah yang bersangkutan harus mengikuti ujian. Karena ujian masuk sangat sulit, siswa kerap mengikuti les tambahan (bimbingan belajar) di *juku* atau *yobiko* pada akhir pekan atau pada sore/malam hari biasa, selain pelajaran sekolahnya (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 178-179).

Pendidikan Tinggi

Ada tiga jenis lembaga pendidikan tinggi, yaitu: universitas, *junior college* (akademi), dan *technical college* (akademi teknik). Di universitas terdapat pendidikan sarjana (S-1) dan pascasarjana (S-2 dan S-3). Pendidikan S-1 berlang-

sung selama 4 tahun, menghasilkan sarjana bergelar *Bachelor's degree*, kecuali di fakultas kedokteran dan kedokteran gigi yang berlangsung selama 6 tahun. Pendidikan pascasarjana dibagi dalam dua kategori, yakni *Master's degree* (S-2) ditempuh selama 2 tahun sesudah tamat S-1 dan *Doctor's degree* (S-3) ditempuh selama 5 tahun.

Junior college memberikan pendidikan selama dua atau tiga tahun bagi para lulusan SMA. Kredit yang diperlukan di *junior college* dapat dihitung sebagai bagian dari kredit untuk memperoleh gelar *Bachelor's degree* (S-1). Lulusan sekolah menengah (setingkat SMP) dapat masuk ke *technical college* (akademi teknik). Pendidikan di lembaga ini berlangsung selama 5 tahun (*full time*) untuk mencetak tenaga teknis. Universitas dan *junior college* memilih mahasiswa berdasarkan hasil ujian masuk serta hasil prestasi belajar dari SMA. Untuk sekolah negeri dan umum daerah, sejak tahun 1979 diberlakukan "tes gabungan kecakapan" yang seragam, sebagai tahap pertama dari sistem ujian masuk. Tahap kedua berupa ujian masuk universitas yang bersangkutan sebagai seleksi final.

Pendidikan tinggi di Jepang berada di bawah pengelolaan tiga lembaga, yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pihak swasta. Ada lima jenis pendidikan tinggi yang bisa dipilih mahasiswa asing di negara Jepang ini, yaitu: program sarjana, pascasarjana, diploma (non gelar), akademi, dan sekolah kejuruan. Program sarjana menerima tiga macam

mahasiswa, yaitu: mahasiswa reguler, mahasiswa pendengar, dan mahasiswa pengumpul kredit. Mahasiswa reguler adalah mereka yang belajar selama 4 tahun, kecuali jurusan kedokteran yang harus menempuh 6 tahun. Mahasiswa pendengar adalah mahasiswa yang diizinkan mengambil mata kuliah tertentu dengan syarat dan jumlah kredit yang berbeda di setiap universitas tetapi kredit itu tidak diakui. Adapun mahasiswa pengumpul kredit hampir sama dengan mahasiswa pendengar, tetapi kreditnya diakui.

Sedangkan program pascasarjana terdiri atas program Master, Doktor, Mahasiswa Peneliti, Mahasiswa Pendengar, dan Pengumpul Kredit. Mahasiswa Peneliti adalah mahasiswa yang diizinkan melakukan penelitian dalam bidang tertentu selama 1 semester atau 1 tahun tanpa tujuan mendapatkan gelar. Program ketiga adalah diploma, yang lama pendidikannya 2 tahun. Enam puluh persen dari program ini diperuntukkan bagi pelajar perempuan dan mengajarkan bidang-bidang seperti kesejahteraan keluarga, sastra, bahasa, kependidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Akademi atau *special training academy* adalah lembaga pendidikan tinggi yang mengajarkan bidang-bidang khusus, seperti keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaan atau kebidupan sehari-hari dengan lama pendidikan antara 1 sampai 3 tahun. Adapun sekolah kejuruan adalah program khusus untuk lulusan SMP dengan lama pendidikan 5 tahun dan bertujuan membina teknis yang mampu

mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 179-180).

Dengan demikian, sistem pendidikan di Jepang dapat digambarkan dalam bagan berikut:

SISTEM PENDIDIKAN DI JEPANG

Usia			
28	Pendidikan Tinggi	Doctor's Degree (S-3)	Fakultas Kedokteran Gigi/ Kedokteran Hewan
27			
26			
25		Master's Degree (S-2)	
24			
23	Pendidikan Sarjana (S-1)	Junior College (S-1)	
22			
21			
20			
19	Pendidikan Menengah Atas	Sekolah Menengah Atas (SMA)	Technical college
18			
17			
16	Pendidikan Wajib	Sekolah Menengah Pertama (SMP)	
15			
14			
13			
12			Sekolah Dasar (SD)
11			
10			
9			
8	Pra Sekolah	Taman Kanak-Kanak (TK) dan Play Group (PG)	
7			
6			
5	Pra Sekolah	Taman Kanak-Kanak (TK) dan Play Group (PG)	
4			
3	Pra Sekolah	Taman Kanak-Kanak (TK) dan Play Group (PG)	

Sistem Pendidikan Indonesia

India dan Malaysia merupakan contoh bagi hadirnya pengaruh sistem pendidikan kolonial Inggris atas kelanjutan sistem pendidikan yang berlaku di kedua negara tersebut. Beberapa praktik pendidikan yang dilaksanakan Inggris ternyata diteruskan, bisa jadi karena dianggap masih relevan, baik oleh India maupun Malaysia. Pengalaman yang sama bisa dipakai untuk menjelaskan akar sistem pendidikan yang berlaku di Indonesia. Bedanya, meskipun pengaruh penjajahan Belanda di Indonesia telah berlangsung selama tiga setengah abad, justru sistem pendidikan yang banyak digunakan adalah masa kependudukan Jepang. Sebut saja sistem penjenjangan pendidikan di Indonesia pasca kemerdekaan. Ketika akhir pendudukan Jepang, pola sistem penjenjangan yang berlaku adalah 6-3-3-4, begitu Indonesia merdeka ternyata sistem penjenjangan ini diteruskan dengan menerapkan 6 tahun bagi SD, 3 tahun bagi SMP, 3 tahun bagi SMA, dan 4 tahun sampai 6 tahun bagi perguruan tinggi. Tentu saja dengan menyebut kolonial tersebut bukan menunjukkan totalitas karena terlalu banyaknya perbedaan yang dikembangkan oleh negara bersangkutan setelah merdeka. Pasca kemerdekaan, sistem pendidikan di Indonesia mengalami serangkaian transformasi dari sistem persekolahannya (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 267-268). Hal ini bisa dilihat dengan adanya perubahan undang-undang tentang pendidikan, yaitu UU No.4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan

pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia dan UU No.2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Melalui undang-undang ini, maka pendidikan nasional telah mempunyai dasar legalitasnya. Namun demikian pendidikan nasional sebagai suatu sistem bukanlah merupakan suatu hal yang baku. Suatu sistem merupakan suatu proses yang terus-menerus mencari dan menyempurnakan bentuknya (H.A.R. Tilaar, 1999: 1). Meskipun demikian, pendidikan di Indonesia selama ini belum mampu menghasilkan lulusan yang dapat diandalkan dalam menciptakan lapangan kerja, bahkan lulusan yang dihasilkan juga masih disanksikan kualitasnya.

Gerakan reformasi tahun 1998, menuntut diadakannya reformasi bidang pendidikan. Forum Rektor yang lahir 7 November 1998 di Bandung, juga mendeklarasikan perlunya reformasi budaya, melalui reformasi pendidikan. Tuntutan reformasi itu dipenuhi oleh DPR-RI bersama dengan pemerintah, dengan disahkan Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) tanggal 11 Juni 2003 (Anwar Arifin, 2003: 1).

Dalam Undang-undang Sisdiknas Tahun 2003 disebutkan bahwa, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pendidikan Prasekolah

Disebut prasekolah karena anak pada usia antara 3 tahun sampai 5 tahun yang dimaksudkan menjadi peserta pendidikan diarahkan untuk persiapan dan adaptasi bagi pendidikan berikutnya di SD. Metode dan materi pelajarannya berpola *learning by doing*, dengan memperbanyak permainan untuk meningkatkan daya kreativitas anak. Itu sebabnya disebut dengan Taman Kanak-kanak (TK). Umumnya TK ini terdiri dua tingkat, yaitu: TK Kecil usia 4 tahun dan TK Besar usia 5 tahun. Namun tidak semua orang tua mengikuti ketentuan tersebut secara ketat. Di antara mereka ada yang memasukkan anaknya langsung ke TK Besar selama setahun, lalu ke SD menjelang anak berusia 6 tahun. Bahkan dalam kasus tertentu seorang anak diterima masuk SD tanpa melewati pendidikan prasekolah ini.

Umumnya kegiatan belajar di TK sederhana, materi pelajarannya berkisar pada pengenalan warna, benda, huruf dan angka, selebihnya diberikan permainan dan keterampilan untuk kreativitas anak, seperti menggunting, melipat, atau mewarnai (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 268-269). Namun demikian, kurang lebih mulai tahun 1990-an di Indonesia juga mengembangkan Kelompok Bermain atau Play Group.

Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar merupakan pendidikan 9 tahun yang terdiri atas program

pendidikan 6 tahun yang diselenggarakan di SD dan 3 tahun di SMP. Kurikulum pendidikan dasar menerapkan sistem semester yang membagi waktu belajar satu tahun ajaran menjadi dua bagian waktu, yang masing-masing disebut semester gasal dan semester genap. Kurikulum pendidikan dasar disusun untuk mencapai tujuan pendidikan dasar. Kurikulum pendidikan dasar merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di SD atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan SMP atau Madrasah Tsanawiyah (MTs).

Padanan dari SD adalah MI, sedangkan SMP adalah MTs. Bedanya, SD dan SMP berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas), sedangkan MI dan MTs di bawah Departemen Agama (Depag). Di samping itu, komposisi kurikulum agama lebih banyak di MI dan MTs dengan rasio 70% umum:30% agama, sedangkan di SD dan SMP hanya memberikan pelajaran agama dua jam pelajaran dalam satu pekan. Jam belajar di SD lebih panjang dari pada TK. Normalnya siswa masuk kelas pukul 07.00 dan pulang pada pukul 12.00. Meskipun demikian, sebagian SD, terutama yang bernaung di bawah ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU, menambah jam belajarnya, baik untuk kegiatan ekstra kurikuler maupun pelajaran yang menjadi ciri khas ormas Islam tersebut sehingga siswa bisa pulang sekolah pada pukul 13.30. Beberapa SD unggulan kadang kala memperpanjang jam belajarnya

hingga sore hari atau biasa dikenal dengan *full day school*. Di sini siswa masuk mulai pukul 07.00 dan pulang pada pukul 16.00, sementara istirahat, shalat, makan siang dimasukkan dalam program pendidikan oleh lembaga tersebut.

Isi kurikulum pendidikan dasar memuat mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam, Ilmu Pengetahuan Sosial, Kerajinan Tangan dan Kesenian, Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, Bahasa Inggris, dan Muatan Lokal. SD menggunakan sistem guru kelas, kecuali untuk mata pelajaran Pendidikan Agama dan Pendidikan Jasmani dan Kesehatan, sedangkan SMP menggunakan sistem guru bidang studi (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 269-270).

Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah meliputi SMA, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah (MA), atau yang sederajat dengannya. Tujuan pendidikan menengah adalah meningkatkan pengetahuan siswa dalam melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi dan mengembangkan diri sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kesenian serta meningkatkan kemampuan siswa sebagai anggota masyarakat dalam mengadakan hubungan timbal balik dengan lingkungan sosial, budaya, dan alam sekitarnya.

Program pelajaran di SMA dan kejuruan lebih luas dari pada pendidikan dasar.

Program pengajaran umum mencakup bahan kajian dan pelajaran yang disusun dalam mata pelajaran Pendidikan Agama, Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa, dan Sastra Indonesia, Sejarah Nasional dan Sejarah Umum, Ilmu Pengetahuan Alam (Fisika, Biologi, dan Kimia), Ilmu Pengetahuan Sosial (Ekonomi, Sosiologi, dan Geografi), dan Pendidikan Seni. Sejak kurikulum 1994, program pengajaran di jenjang pendidikan menengah ini diatur dalam program pengajaran khusus yang meliputi tiga jurusan, yakni program Bahasa, Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), dan Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS). Program Pengajaran Khusus ini diselenggarakan di kelas II dan dipilih oleh siswa sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Program ini dimaksudkan untuk mempersiapkan siswa guna melanjutkan pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi dalam bidang pendidikan akademik ataupun pendidikan profesional dan mempersiapkan siswa secara langsung atau tidak langsung untuk siap terjun ke lapangan kerja.

Kurikulum SMA dan yang sederajat menerapkan sistem semester yang membagi waktu belajar satu tahun ajaran menjadi dua bagian waktu yang masing-masing disebut semester gasal dan semester genap, sedangkan sistem pengajarannya memakai sistem guru bidang studi (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 272-273).

Pendidikan Tinggi

Setelah seorang siswa yang telah menamatkan studi di SMA atau yang

**SISTEM PERSEKOLAHAN DI INDONESIA
DALAM UU RI NO. 20 TAHUN 2003**

Usia

setaraf dengannya, apabila ia bermaksud untuk melanjutkan pendidikannya bisa memilih perguruan tinggi manapun yang ada di Indonesia. Berbeda dengan sekolah menengah, perguruan tinggi menerapkan sistem kredit semester (SKS). Di perguruan tinggi, seorang mahasiswa jika dapat menghabiskan jumlah kredit mata kuliah yang ditargetkan dan dapat menempuhnya dalam waktu tertentu sesuai dengan rencana yang diprogramkan, mahasiswa tersebut dapat menyelesaikan pendidikan tinggi Strata 1 (S 1) dalam waktu 4 tahun. Namun bila tidak sanggup karena banyak mengulang mata kuliah yang rendah nilainya atau karena cuti, waktu yang ditempuh untuk diwisuda sebagai seorang sarjana bisa lebih dari 4 tahun. Kalau ia berhasil wisuda dan berniat melanjutkan studi lanjut, masih ada dua tahap dalam pendidikan tinggi yang dapat ditempuhnya, yaitu jenjang S 2 atau Magister yang normalnya ditempuh selama 2 tahun dan jenjang S 3 atau Doktor yang efektifnya ditempuh selama 2 tahun, sedangkan sisanya untuk penelitian. Apabila seluruh tahap pendidikan tinggi ini ditempuh, diberi gelar Doktor untuk bidang yang dipilihnya. Jenjang ini mengakhiri karier akademik seseorang secara formal.

Seperti halnya di banyak negara lain, di Indonesia juga dikenal adanya perguruan tinggi negeri yang dikelola langsung oleh pemerintah dan perguruan tinggi swasta. Dalam realitasnya, pelajar Indonesia banyak yang mendaftar ke

Perguruan Tinggi Negeri (PTN) terlebih dahulu, baru menetapkan pada Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Kesan sekolah negeri dan PTN lebih unggul dan absah serta dianggap lebih mudah mendapat kerja masih melekat dan banyak diyakini oleh masyarakat. Padahal, setelah peraturan Badan Akreditasi Nasional (BAN) untuk perguruan tinggi diberlakukan dengan status *terakreditasi* dan *non-terakreditasi*, sebenarnya PTN dan PTS diperlakukan sama. Bahkan, bisa jadi PTS mendapat nilai lebih baik daripada PTN. Soal unggul dan jaminan kerja merupakan perkara yang relatif. Perguruan tinggi sekedar menyiapkan pesertanya untuk bermasyarakat, sedang keberhasilan itu dipengaruhi oleh banyak faktor. Perguruan tinggi diharapkan berfungsi sebagai *agent of change* bagi pola kehidupan masyarakat modern. Sesuai dengan Tri Darma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian dan pengabdian, pendidikan dilangsungkan dalam bentuk perkuliahan di ruang kelas, penelitian atau riset dilakukan terutama oleh mahasiswa semester akhir sebelum diwisuda (berupa penulisan skripsi, tesis, ataupun disertasi), sedangkan pengabdian dilakukan dalam bentuk Kuliah Kerja Nyata (KKN), atau kalau di universitas keguruan berupa Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 275-276).

Berpijak pada paparan di atas, sistem pendidikan di Indonesia dapat digambarkan sebagaimana dalam bagan berikut:

24	Pendidikan Tinggi	Doktor (S-3)	Program Doktor (S-3)	Spesialis II (SP II)			
23		Magister (S-2)	Program Magister (S-2)	Spesialis I (SP I)			
22		Sarjana (S-1)	Program Sarjana (S-1)	Diploma 4 (D-4)	Diploma 3 (D-3)	Diploma 2 (D-2)	Diploma 1 (D-1)
21							
20	Pendidikan Menengah	Madrasah Aliyah (MA)	Sekolah Menengah Atas	Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)			
19							
18							
17	Pendidikan Dasar	Madrasah Ibtidaiyah (MI)	Sekolah Dasar	Sekolah Dasar (SD)			
16							
15	Kelembagaan Pendidikan Islam			Sektors Melang dan ngambudaya lokal dalam konteks budaya asli. Pesantren saat itu masih dalam bentuk sederhana, <i>salaf</i> , dan non-klasikal. Lalu, dengan diperkenalkannya sekolah dalam bentuk klasikal oleh pemerintah Belanda, muncullah madra-			
14	Secara historis Lembaga Pendidikan Islam (LPI) tertua yang ada di Indonesia adalah pesantren. Terlepas dari pengaruh Hind-Budha atau Arab, pesantren merupakan produk interaksi dan akul-						
13	Kelembagaan Pendidikan Islam			Sektors Melang dan ngambudaya lokal dalam konteks budaya asli. Pesantren saat itu masih dalam bentuk sederhana, <i>salaf</i> , dan non-klasikal. Lalu, dengan diperkenalkannya sekolah dalam bentuk klasikal oleh pemerintah Belanda, muncullah madra-			
12	Secara historis Lembaga Pendidikan Islam (LPI) tertua yang ada di Indonesia adalah pesantren. Terlepas dari pengaruh Hind-Budha atau Arab, pesantren merupakan produk interaksi dan akul-						
11	Kelembagaan Pendidikan Islam			Sektors Melang dan ngambudaya lokal dalam konteks budaya asli. Pesantren saat itu masih dalam bentuk sederhana, <i>salaf</i> , dan non-klasikal. Lalu, dengan diperkenalkannya sekolah dalam bentuk klasikal oleh pemerintah Belanda, muncullah madra-			
10	Secara historis Lembaga Pendidikan Islam (LPI) tertua yang ada di Indonesia adalah pesantren. Terlepas dari pengaruh Hind-Budha atau Arab, pesantren merupakan produk interaksi dan akul-						
9	Kelembagaan Pendidikan Islam			Sektors Melang dan ngambudaya lokal dalam konteks budaya asli. Pesantren saat itu masih dalam bentuk sederhana, <i>salaf</i> , dan non-klasikal. Lalu, dengan diperkenalkannya sekolah dalam bentuk klasikal oleh pemerintah Belanda, muncullah madra-			
8	Secara historis Lembaga Pendidikan Islam (LPI) tertua yang ada di Indonesia adalah pesantren. Terlepas dari pengaruh Hind-Budha atau Arab, pesantren merupakan produk interaksi dan akul-						
7	Kelembagaan Pendidikan Islam			Sektors Melang dan ngambudaya lokal dalam konteks budaya asli. Pesantren saat itu masih dalam bentuk sederhana, <i>salaf</i> , dan non-klasikal. Lalu, dengan diperkenalkannya sekolah dalam bentuk klasikal oleh pemerintah Belanda, muncullah madra-			
6	Kelembagaan Pendidikan Islam			Sektors Melang dan ngambudaya lokal dalam konteks budaya asli. Pesantren saat itu masih dalam bentuk sederhana, <i>salaf</i> , dan non-klasikal. Lalu, dengan diperkenalkannya sekolah dalam bentuk klasikal oleh pemerintah Belanda, muncullah madra-			
5	Kelembagaan Pendidikan Islam			Sektors Melang dan ngambudaya lokal dalam konteks budaya asli. Pesantren saat itu masih dalam bentuk sederhana, <i>salaf</i> , dan non-klasikal. Lalu, dengan diperkenalkannya sekolah dalam bentuk klasikal oleh pemerintah Belanda, muncullah madra-			

sah sebagai *counter institution* yang tidak hanya memuat pelajaran agama, tetapi juga pelajaran umum sebagaimana yang dikembangkan oleh berbagai Ormas Islam saat itu. Selama periode Belanda dan pendudukan Jepang, pendidikan Islam diorganisasikan oleh umat Islam sendiri melalui sekolah swasta dan pusat-pusat latihan. Ketiga bentuk lembaga pendidikan tersebut (pesantren, sekolah dan madrasah) eksistensinya tetap ada, bahkan terus dikembangkan sampai pasca kemerdekaan R.I. hingga sekarang. Adapun perguruan tinggi, baik PTU maupun PTAI, merupakan bentuk dan jenjang lanjutan dari ketiga Lembaga Pendidikan Islam tersebut.

Institusi pesantren, sekolah dan madrasah di Indonesia memiliki karakteristik tersendiri, yang bisa dibedakan satu sama lain, terutama dalam hal porsi materi pelajaran agama serta afiliasinya dengan departemen terkait. Pesantren, misalnya memuat materi agama secara dominan, sedangkan sekolah umum memberikan alokasi waktu dua jam pelajaran agama dalam satu pekannya, sementara madrasah sebelum tahun 1975 meliputi materi agama 70% dan materi umum 30%, dan setelah SKB 3 Menteri tahun 1975, komposisinya dibalik menjadi 30% materi agama dan 70% materi umum. Meskipun demikian, khusus untuk madrasah ini, pada tahun 1986 diselenggarakan *madrasah pilot project* yang mengikuti komposisi materi agama 70% dan materi umum 30%, seperti yang berlaku sebelum tahun 1975. Keberadaan *madrasah pilot project* ini jumlahnya dibatasi pada

beberapa daerah saja. Keberadaan Madrasah Aliyah Negeri Program Khusus (MAN PK) merupakan contoh konkret implementasi dari kebijakan tersebut.

Adapun dalam hal afiliasinya terhadap lembaga pemerintah, pesantren merupakan bentuk LPI mandiri yang umum diselenggarakan oleh masyarakat. Karena itu, kurikulumnya bisa berbeda antara satu pesantren dengan pesantren lainnya, sebab program pendidikannya disusun sendiri. Sementara sekolah, mulai jenjang SD, SMP, SMA hingga bentuk dan jenjang lanjutan di PT, saat ini berada di bawah Departemen Pendidikan Nasional (Diknas). Adapun madrasah, baik MI, MTs, MA, maupun bentuk lain jenjang lanjutnya, yakni PTAI, dikelola oleh Departemen Agama. Karena itu kurikulum di sekolah dan madrasah bersifat sentral serta seragam secara nasional meskipun dalam beberapa aspek terjadi desentralisasi kebijakan.

Perkembangan kelembagaan PAI ditangani oleh Departemen Agama, melalui Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam (Dirjenbimbagais) yang dibentuk pada tahun 1978. Di sini diadakan kategorisasi kebijakan kelembagaan PAI dalam beberapa jenis. *Pertama*, PAI yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagai pendidikan jalur luar sekolah, misalnya pesantren. *Kedua*, PAI di Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI). *Ketiga*, PAI di lingkungan sekolah umum (dari SD, SMP, sampai SMA) dan PAI di Perguruan Tinggi (Abd. Rachman Assegaf, 2003: 275-276).

Persamaan dan Perbedaan

Dari kajian sistem pendidikan di atas, penulis menemukan adanya beberapa persamaan dan perbedaan sistem pendidikan yang diterapkan pada dua negara tersebut. Adapun persamaannya:

1. Sistem penjenjangan persekolahan pendidikan di kedua negara tersebut sama-sama menggunakan pola 6-3-3-4, yaitu 6 tahun bagi SD, 3 tahun bagi SMP, 3 tahun bagi SMA, dan 4 tahun di perguruan tinggi.
2. Usia siswa yang belajar pada setiap jenjangnya ada yang sama, yaitu pendidikan dasar 9 tahun antara usia 6-15 tahun, sekolah menengah atas usia 16-18 tahun, dan pendidikan tinggi antara 19-25 tahun.
3. Kedua negara tersebut mewajibkan belajar bahasa Inggris sejak tahun pertama di SMP, dengan demikian siswa diharapkan mempunyai kemampuan yang berwawasan internasional.

Sedangkan perbedaan yang menonjol pada sistem pendidikan di kedua negara ini sebagai berikut:

1. Dalam tujuan umum pendidikan Jepang mengutamakan perkembangan kepribadian secara utuh, menghargai nilai-nilai individual, dan menanamkan jiwa yang bebas. Sedangkan di Indonesia pendidikan bertujuan agar peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.

2. Jepang tidak memasukkan mata pelajaran pendidikan agama di semua jenjang persekolahan (memisahkan pendidikan agama dengan persekolahan), sedangkan di Indonesia pendidikan agama adalah mata pelajaran yang wajib untuk setiap jenjang persekolahan.
3. Dilihat dari kurikulum yang dikembangkan dapat dikemukakan beberapa hal:
 - a. Kurikulum TK di Jepang tidak membebani anak, karena anak tidak dijejali materi-materi pelajaran secara kognitif tetapi lebih pada pengenalan dan latihan ketrampilan hidup yang dibutuhkan anak untuk kehidupan sehari-hari, seperti latihan buang air besar sendiri, gosok gigi, makan, dan lain sebagainya. Sedangkan kurikulum di Indonesia telah berorientasi pada pengembangan intelektual anak.
 - b. Mata pelajaran level pendidikan dasar di Jepang tidak seberagam yang dikembangkan di Indonesia, jumlahnya tidak banyak, sehingga berbagai mata pelajaran tersebut diberikan pada waktu yang berlainan setiap hari selama seminggu, maka jarang ada jadwal pelajaran yang sama pada hari yang berbeda.
 - c. Di Indonesia jarang ditemukan adanya mahasiswa peneliti, lebih-lebih mahasiswa pendengar, sehingga yang ada

mahasiswa reguler. Hal itu terjadi barangkali karena orientasi belajar bagi mahasiswa Indonesia jauh berbeda dengan mahasiswa Jepang.

4. Pendidikan wajib di Jepang gratis bagi semua siswa, bahkan bagi anak yang kurang mampu mendapat bantuan khusus dari pemerintah pusat maupun daerah untuk biaya makan siang, sekolah, piknik, kebutuhan belajar, perawatan kesehatan dan kebutuhan lainnya, sedangkan di Indonesia masih sebatas slogan (kecuali di daerah tertentu, seperti kebijakan di Sukoharjo, tetapi baru terbatas biaya sekolah saja).
5. Sistem administrasi pendidikan di Jepang sudah lama menerapkan kombinasi antara sentralisasi, desentralisasi, Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), dan partisipasi masyarakat. Sedangkan di Indonesia baru dalam proses peralihan dari sentralisasi ke desentralisasi dan juga diberlakukan MBS.

Di samping itu juga ada perbedaan kecil dalam hal mulai masuknya anak pada pendidikan prasekolah, terutama di TK. Kalau di Jepang dimulai usia 3 tahun, sedang di Indonesia dimulai pada usia 4 tahun.

Kesimpulan

Dengan mengkaji persamaan dan perbedaan tersebut, dapat dikemukakan beberapa hal berikut:

1. Kebijakan pendidikan di Indonesia masih merupakan warisan kebijakan kolonial, sehingga belum sesuai dengan kebutuhan riil rakyat.
2. Kebijakan pendidikan di Indonesia sudah berubah, hal ini terjadi karena:
 - a. Tidak bersandar pada filosofi yang kuat.
 - b. Sangat dipengaruhi oleh aktor-aktor non utama, misalnya: politik, LSM, media massa, pengamat pendidikan, organisasi massa, tokoh perorangan dan perguruan tinggi.
3. Pendidikan di Indonesia belum menemukan karakter bangsa dan belum mampu mempengaruhi ekonomi, politik maupun sosial budaya.
4. Dengan mengacu pada tujuan pendidikannya, pendidikan di Jepang dapat membangun karakter bangsanya, yaitu kejujuran, kedisiplinan, ketaatan dan tanggung jawab, sedangkan di Indonesia masih sangat universal.
5. Kurikulum yang dikembangkan belum sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, terutama di tingkat TK dan SD, dan *over load* SMP dan SMA.
6. Semangat belajar rakyat Indonesia yang masih lemah, sehingga kemauan belajar mereka banyak yang masih karena kebutuhan formalitas. Hal ini menjadikan sepinya mahasiswa peneliti menurut mahasiswa pendengar.

Berpijak pada temuan di atas, guna meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia, maka menurut hemat penulis perlu dilakukan beberapa hal berikut:

1. Kebijakan pendidikan yang diambil pemerintah seyogyanya bertumpu pada filosofi yang kuat.
2. Dalam rangka pemerataan pendidikan, pemerintah memberikan pendidikan gratis bagi semua peserta didik yang menempuh pendidikan dasar.

3. Meningkatkan anggaran di bidang pendidikan untuk penambahan beasiswa bagi anak-anak yang kurang mampu.
4. Menyederhanakan kurikulum, dalam arti tidak *over load* pada masing-masing jenjang pendidikan, dan pengembangannya disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan psikologis anak.
5. Memantapkan sistem administrasi yang digunakan dalam mengelola lembaga-lembaga pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Assegaf, Abd. Rachman. 2003. *Internasionalisasi Pendidikan: Sketsa Perbandingan Pendidikan di Negara-Negara Islam dan Barat*, Yogyakarta: Gama Media.
- Arifin, Anwar. 2003. *Memahami Paradigma Baru Pendidikan Nasional Dalam Undang-Undang Sisdiknas*, Jakarta: Departemen Agama RI Direktorat Jendral Kelembagaan Agama Islam.
- Tilaar, H.A.R. 1999. *Beberapa Agenda Reformasi Pendidikan Nasional: Dalam Perspektif Abad 21*, Magelang: Indonesia Tera.
- Barnadib, Imam. 1986. *Dasar-Dasar Pendidikan Perbandingan*, Yogyakarta: Institute Press IKIP Yogyakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), Jakarta: Sinar Grafika.
- <http://murniramli.wordpress.com/2007/03/16/taman-kanak-kanak-di-jepang/>
- <http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-01.html>
- <http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-02.html>
- <http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id09-03.html>
- <http://www.clair.or.id.jp/tagengo/general/id/id11-04.html>